

Implementasi program sekolah siaga kependudukan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah

Oleh:

Sudrajat

Universitas Negeri Yogyakarta
sudrajat@uny.ac.id

Shigbatullah Mujadidi

Universitas Negeri Yogyakarta
shibghotullahmujadidi.2020@student.uny.ac.id

submitted: 07-07-2023 revised: 12-07-2023 accepted: 21-07-2023

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi sekolah siaga kependudukan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Subjek penelitian terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua pelaksana program sekolah siaga kependudukan, guru, dan 249 peserta didik. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi dan angket. Analisis data menggunakan teknik analisis data interaktif Miles & Huberman yang terdiri dari 1) pengumpulan data; 2) reduksi data; 3) penyajian data; dan 4) penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Pemalang dianggap sebagai salah satu sekolah yang representatif untuk melaksanakan program tersebut. Sarana prasarana berupa pojok kependudukan sebagai salah satu identitas sekolah siaga kependudukan; sekolah telah membentuk tim pengembang; 2) Sekolah mengintegrasikan topik kependudukan dalam pembelajaran di kelas, program ekstrakurikuler, dan kegiatan pendidikan lainnya.

Kata kunci: Sekolah siaga kependudukan, kependudukan, generasi berencana.

Abstract

The research aims to determine the implementation of population alert schools in Pemalang Regency, Central Java. The subjects included the principal, deputy principal, chief executive of the population alert school program, teachers, and students. Data collection techniques use interviews, observation, documentation, and questionnaires. Data analysis uses Miles & Huberman's interactive data analysis technique, which consists of 1) data collection, 2) data reduction, 3) data presentation, and 4) concluding. Data validity using triangulation techniques. The research results are as follows: 1) SMA Negeri 1 and SMA Negeri 3 Pemalang are considered as one of the representative schools to implement the program. Infrastructure facilities include a population corner as one of the identities of a population alert school; the school has formed a development team. 2) Schools integrate population topics in classroom learning, extracurricular programs, and other educational activities.

Keywords: Population alert school, population, planning generation

Pendahuluan

Jumlah populasi dunia saat ini dilansir dari data UNFPA (*United Nation Population Fund*) telah mencapai lebih 8 milyar jiwa dimana Indonesia menempati urutan ke empat jumlah penduduk terbanyak. Berdasarkan data hasil sensus penduduk pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 270 juta jiwa dengan angka pertumbuhan penduduknya sebesar 1.25%. Angka pertumbuhan penduduk tersebut relatif lebih rendah dibanding dengan periode sensus sebelumnya. Namun menurut proyeksi pertumbuhan penduduk di Indonesia akan terus mengalami penambahan. Indonesia diprediksi akan mencapai bonus demografi pada tahun 2045, dimana jumlah penduduk usia produktif mencapai 70% (Mu'awwanah & Ridho Illah, 2022). Besarnya jumlah usia produktif dapat menjadi pisau bermata dua bagi Indonesia, dengan jumlah penduduk yang besar tentunya akan menguntungkan dari sisi pembangunan. Namun sebaliknya, apabila Indonesia tidak mampu memanfaatkan bonus demografi berpotensi menimbulkan tingginya angka pengangguran dan sederet permasalahan yang mengitarinya.

Salah satu upaya dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas adalah melalui pendidikan. Namun pada kenyataannya saat ini kualitas pendidikan Indonesia masih jauh untuk menggapai bonus demografi tersebut. Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik, 2022) menyatakan persentase tingkat pendidikan penduduk Indonesia paling besar merupakan lulusan sekolah dasar dan menengah yaitu 24,83 lulusan tingkat SD, 22,56% lulusan SMP, dan 29,97% lulusan SMA. Sementara itu sarjana masih berada di 10,15%. Jumlah penduduk muda yang tinggi namun tingkat pendidikan masih relatif rendah. Dikutip dari tirto.id dalam jumlah sarjana, Indonesia sangat tertinggal jauh dari negara-negara lain, sebagai contoh Malaysia memiliki persentase jumlah sarjana sebesar 75% sedangkan Korea Selatan mencapai 90%. Sementara itu Indonesia baru menargetkan 75% pada tahun 2050.

Selain itu dengan jumlah penduduk yang besar apabila tidak dimanfaatkan dengan baik tentunya akan mendatangkan berbagai masalah yang berkaitan dengan kependudukan. Tidak hanya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah lain seperti kemiskinan, pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah, kualitas kesehatan yang rendah, dan kepadatan penduduk (Husin, 2017). Berdasarkan data sensus penduduk Indonesia tahun 2020, saat ini persebaran penduduk tidak merata di setiap daerah. Pulau Jawa menjadi pulau terpadat di Indonesia yang dihuni oleh sekitar 151.9 juta jiwa atau lebih dari 56% dari total jumlah penduduk Indonesia. Tidak merata dan kepadatan penduduk tersebut menjadi pemicu timbulnya masalah pendudukan yang lain. Penyebab lain dari timbulnya masalah kependudukan di Indonesia adalah belum adanya kesadaran masyarakat tentang masalah kependudukan. Menurut data Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yang dikutip dari RPJMN/SKAP tahun 2017 tingkat pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan masih cukup rendah yakni sebesar 22.7%. Sementara itu pengetahuan remaja tentang isu kependudukan juga masih rendah yaitu sebesar 34.8%. Kurangnya sosialisasi dan pendidikan kesehatan reproduksi dapat mengakibatkan dampak yang tidak diinginkan seperti penyakit menular seksual, kehamilan dini, dan aborsi, yang dapat mengakibatkan morbiditas bahkan

kematian ibu. Data angka kelahiran usia 15-19 tahun (*Age Spesific Fertility Rate/ASFR*) juga masih relative tinggi, meskipun ada penurunan dari tahun ke tahun.

Rendahnya kesadaran remaja terhadap isu kependudukan dapat dilihat timbulnya sikap permisif terhadap perilaku seksual dikalangan remaja yang dianggap sebagai hal yang normal dimasa sekarang. Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran norma dikalangan remaja. Sebagai contoh berdasarkan data dari SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) dikutip dari Najwa (2020) bahwa pada tahun 2017 tercatat sebanyak 80% perempuan dan 84% laki-laki mengakui pernah berpacaran dan 44-45% diantaranya berasal dari rentang usia 15-17. Sementara itu terdapat 59% perempuan dan 74% laki-laki telah melakukan hubungan seksual pra nikah mulai berhubungan seksual pertama kali pada umur 15-19 tahun dengan persentase tertinggi pada usia 17 tahun sebesar 19%. Diantara remaja yang telah melakukan hubungan seksual dilaporkan 7-12% mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.

Melihat permasalahan-permasalahan penduduk yang ada diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Kesadaran remaja terhadap isu-isu kependudukan masih rendah karena masih minimnya pengetahuan tentang kependudukan Indonesia juga diperlukan suatu wadah untuk membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat serta tanggap terhadap masalah kependudukan. Oleh karena itu salah satu topik yang perlu diketahui dan dipahami oleh kalangan remaja dan masyarakat tentang kependudukan dan kesehatan reproduksi. Informasi yang disesuaikan dengan usia dan kesiapan remaja harus diberikan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang sistem reproduksi, proses, fungsi, pemeliharaan kesehatan reproduksi, dan konsep keluarga berencana (BKKBN, 2020: 6).

Salah satu wahana yang dianggap paling efektif adalah pendidikan kependudukan. Melalui pendidikan kependudukan diharapkan dapat menggugah kesadaran dan kepedulian peserta didik terhadap dinamika kependudukan dan dampak yang ditimbulkannya, serta memberikan wawasan kepada peserta didik tentang usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup serta berperilaku yang sesuai dengan pengetahuan kependudukan (Prasetyo, 2014). Isu dan permasalahan kependudukan sangat erat kaitannya dengan tata kehidupan manusia, sehingga peran pendidikan kependudukan sangat penting dan strategis dalam mengatasi berbagai permasalahan kependudukan. Pendidikan kependudukan merukan program pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan tentang keluarga, masyarakat, dan situasi demografi, serta dengan tujuan untuk menumbuhkan sikap dan perilaku yang rasional dan bertanggung jawab terhadap negaranya sendiri (UNESCO, 1978: 15).

Pemerintah Indonesia melalui BKKBN merancang pendidikan kependudukan melalui program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di beberapa jenjang pendidikan formal baik SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Adanya program Sekolah siaga kependudukan dapat mempertajam materi yang berkaitan dengan kependudukan. Sekolah siaga kependudukan diharapkan dapat memberikan arahan dan menjadi pedoman bagi penanggung jawab dan pengelola pendidikan, dan guru dalam menjalankan program pendidikan kependudukan, KB, dan pemberdayaan keluarga, sehingga dapat memberikan peserta didik pemahaman, pengetahuan, kesadaran, serta sikap dan perilaku berwawasan kependudukan sebagai hasil pendidikan kependudukan dan Keluarga Berencana. Sekolah Siaga Kependudukan merupakan implementasi operasional pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang

terintegrasi, dikelola dari dan oleh penyelenggara pendidikan melalui pemberdayaan sekolah, serta memberikan kemudahan akses kepada peserta didik untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan memperoleh keterampilan khusus dalam bidang kependudukan, keluarga berencana, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi kreatif serta aspek lainnya yang berkaitan dengan kependudukan (BKKBN, 2017: 4).

Namun pelaksanaan sekolah siaga kependudukan bukan tanpa kendala, pada kenyataan di beberapa sekolah yang ditunjuk untuk melaksanakan sekolah siaga kependudukan masih belum dilaksanakan dengan optimal. Abdiyah dkk (2019) menyebutkan sejak tahun 2017 hingga Agustus 2019, jumlah sekolah peserta program sekolah siaga kependudukan di Jawa Timur sebanyak 58 SMA/ sederajat dan 24 SMP/ sederajat hasilnya hanya sekitar 20,8% yang berhasil melaksanakan misinya. Saptani & Raharjo (2020) menunjukkan terdapat perbedaan secara statistik pemahaman/wawasan peserta didik tentang kependudukan antara peserta didik Sekolah Siaga Kependudukan dan peserta didik non Sekolah Siaga Kependudukan di Provinsi Sumatera Utara, bahwa pada faktanya pemahaman kependudukan peserta didik non Sekolah Siaga Kependudukan malah lebih bagus dibandingkan dengan peserta didik Sekolah Siaga Kependudukan. Implementasi pendidikan kependudukan adalah siswa beranggapan materi kependudukan terlalu luas dan banyak hapalan serta motivasi belajar siswa yang kurang. Upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengimplementasikan pendidikan kependudukan adalah memberikan metode dan media pembelajaran yang menarik untuk mempelajari materi kependudukan serta penyediaan layanan pojok kependudukan (Ulfah, 2021).

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian naturalistik. Perilaku dan makna yang dianut oleh individu atau sekelompok manusia hanya dapat dipahami melalui analisis yang bersifat alamiah (*natural setting*). Peneliti meyakini bahwa dengan pendekatan kualitatif naturalistik dapat sesuai untuk memahami permasalahan sosial secara mendalam. Penelitian kualitatif naturalistik digunakan untuk memahami aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi subjek penelitian melalui keterangannya yang sulit diungkapkan menggunakan pengukuran dengan instrumen pada umumnya.

Penelitian dilaksanakan di SMA Kabupaten Pematang yang telah menjalankan program sekolah siaga kependudukan yaitu: SMA Negeri 1 Pematang dan SMA Negeri 3 Pematang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2022 - Mei 2022, terhitung dari proses penyusunan proposal sampai pada penyusunan laporan penelitian. Subjek penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu (*purposive sampling*). Pertimbangan tersebut dengan memperhatikan kesesuaian antara apa yang diteliti dengan informan/narasumber. Subjek dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program sekolah siaga kependudukan diantaranya: Kepala sekolah SMA Negeri 3 Pematang, Ketua pelaksana SSK SMA Negeri 3 Pematang dan Ketua pelaksana SSK SMA Negeri 1 Pematang sebagai narasumber utama guna memperoleh informasi berkaitan pelaksanaan program sekolah siaga kependudukan, wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Pematang, guru mata pelajaran dan peserta didik sejumlah 249 orang yang dipilih secara acak sebagai sampel penelitian.

Pemilihan teknik pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang alamiah (*natural setting*), sumber data primer, data sekunder, dan teknik pengumpulan data yang lebih ditekankan pada observasi non-partisan, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Sugiyono, 2013: 308). Peneliti mendapatkan data data primer yang bersumber dari sumber lisan, tulisan, pengamatan dan angket, serta menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen sebagai data pendukung. Sehingga dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain: wawancara, observasi, dokumentasi, dan angket. Teknis analisis data kualitatif dilakukan dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan memilah data yang penting dan yang akan dipelajari. Analisis data dilakukan agar data yang telah diperoleh lebih bermakna. Melalui analisis data, data yang telah diperoleh kemudian disederhanakan sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan sehingga hasil penelitian mudah dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain.

Keabsahan data dilakukan untuk menjamin kebenaran informasi/data yang telah diperoleh dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Keabsahan data dapat dibuktikan apabila tidak ada perbedaan antara hasil laporan penelitian dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Untuk meningkatkan drajat keabsahan data penelitian dilakukan proses triangulasi, yaitu dengan melakukan pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan cara. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, yaitu dengan menguji keabsahan data dengan cara mengecek data melalui teknik pengumpulan data yang berbeda antarlain wawancara, observasi, dan dokumentasi serta angket/kuisisioner.

Hasil dan Pembahasan

Sekolah Siaga Kependudukan di SMA Negeri 1 Pemalang

Hasil penelitian menunjukkan latar belakang dilaksanakannya Sekolah Siaga Kependudukan di SMA Negeri 1 Pemalang yaitu karena adanya penunjukkan dari dinas sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten Pemalang. Adanya Surat Keputusan (SK) dengan nomor 463.12/1226 tentang penetapan Sekolah Siaga Kependudukan ramah anak di Jawa Tengah tahun 2021 yang dikeluarkan oleh dinas terkait menjadi bukti penunjukkan tersebut. Dasar dari penunjukkan tersebut karena SMA Negeri 1 Pemalang telah dianggap sebagai sekolah yang representatif sehingga mampu melaksanakan program tersebut dengan baik.

Tujuan dari pelaksanaan program Sekolah Siaga Kependudukan di SMA kabupaten Pemalang yaitu untuk memberikan pengetahuan atau wawasan kependudukan kepada peserta didik, mengembangkan sikap tanggap dan peduli terhadap isu-isu kependudukan, seperti kepadatan penduduk, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Permasalahan yang berkaitan dengan generasi berencana perlu diajarkan juga seperti kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia nikah. Tujuan tersebut mengajarkan peserta didik untuk menjaga lingkungan mereka dengan sebaik-baiknya. Diharapkan dengan adanya program Sekolah Siaga Kependudukan ini dapat memberikan bekal pengetahuan yang lebih mendalam kepada peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari BKKBN (2017: 2) bahwa tujuan dari diselenggarakannya Sekolah Siaga Kependudukan ialah menumbuhkan kesadaran dan rasa

tanggung jawab para peserta didik terhadap kondisi kependudukan di daerahnya masing-masing; serta mengembangkan sikap dan perilaku yang tepat para peserta didik untuk mengambil keputusan dalam mengatasi masalah-masalah kependudukan.

Untuk mewujudkan tujuan Sekolah Siaga Kependudukan tersebut, sekolah memiliki visi dan misi yang mengarah pada siaga kependudukan. Visi dan misi sekolah dapat menggambarkan komitmen sekolah dalam melaksanakan program Sekolah Siaga Kependudukan. SMA Negeri 1 Pemalang tidak secara spesifik menuliskan siaga kependudukan baik dalam visi maupun misi sekolah. Namun secara umum visi dan misi sekolah telah mencakup semua bidang kehidupan termasuk kependudukan yaitu mewujudkan insan Indonesia yang berkepribadian Pancasila, kuat iman, berakhlak mulia, berprestasi prima, berwawasan lingkungan dan global.

Sekolah telah berusaha menyediakan fasilitas sarana prasarana yang dapat mendukung proses pembelajaran dengan kondusif. SMA Negeri 1 Pemalang memiliki ruang kelas yang nyaman representatif, di setiap kelas sudah dilengkapi dengan LCD proyektor yang dapat mendukung proses pembelajaran yang aktif kreatif dan menyenangkan. Selain itu untuk mendukung program SSK, sekolah memiliki pojok kependudukan sebagai pusat informasi kependudukan, kantin sehat dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang bersih dan nyaman, serta aula yang cukup luas.

Pojok kependudukan menjadi salah satu identitas dari sekolah yang telah melaksanakan Sekolah Siaga Kependudukan. Pojok kependudukan dijadikan sebagai salah satu sarana dan yang disediakan oleh sekolah sebagai pusat kegiatan peserta didik dalam belajar dan memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan kependudukan dan keluarga. Sebagai pusat kegiatan dalam pojok kependudukan disediakan berbagai fasilitas seperti buku-buku, majalah, poster-poster serta data-data kependudukan yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk memperoleh informasi atau pengetahuan tentang kondisi kependudukan disekitar mereka.

Dari sisi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan dan sebagai bentuk komitmen SMA Negeri 1 Pemalang telah membentuk tim pengembangan Sekolah Siaga Kependudukan yang diprakarsai oleh kepala sekolah SMA Negeri 1 Pemalang yang melibatkan segenap guru dan karyawan sebagai tim inti yang terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, ketua pelaksana, sampai anggota dan tim teknis yang terdiri dari kelompok-kelompok kerja seperti bidang pojok kependudukan, bidang sosialisasi dan *workshop* kurikulum SSK, bidang poster dan mading siaga kependudukan, bidang pemeriksa kesehatan reproduksi remaja, bidang buletin siaga kependudukan, bidang literasi pojok sekolah, dan kelompok kerja kelas siaga kependudukan, duta kependudukan, dan kelompok kerja Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R), serta melibatkan seluruh warga sekolah yang telah memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sekolah Siaga Kependudukan merupakan sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran dan atau muatan lokal khusus kependudukan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Sitorus (2017: 21), bahwa pemerintah melalui BKKBN dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Nasional untuk mengintegrasikan program Sekolah Siaga Kependudukan dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau dalam bentuk kegiatan pendidikan di

luar mata pelajaran dan pelayanan konseling yang menyesuaikan dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat peserta didik melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten dan berwenang di sekolah/madrasah. Namun berdasarkan hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa Sekolah Siaga Kependudukan belum diatur dalam kurikulum sekolah. Sekolah Siaga Kependudukan yang dijalankan oleh SMA Negeri 1 Pemalang diintegrasikan ke dalam RPP mata pelajaran yang sudah ada, jadi bukan merupakan mata pelajaran baru.

Sekolah sebagai wahana yang tepat dalam mengembangkan pengetahuan dan guru berperan penting dalam membentuk dan mengembangkan wawasan dan pengetahuan peserta didik terkait kependudukan. Kegiatan sosialisasi pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan di sekolah dilakukan untuk lebih mengenalkan program Sekolah Siaga Kependudukan kepada seluruh warga sekolah dan meningkatkan kompetensi para guru. Sekolah memiliki guru yang dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang mengajarnya.

Guru dituntut untuk mampu membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembaran Kerja Siswa yang digunakan dalam pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun sedemikian rupa untuk menyisipkan atau mengarah pada materi-materi siaga kependudukan. Namun tidak semerta-merta bisa langsung diinternalisasikan dalam setiap mata pelajaran. Materi-materi kependudukan disisipkan dalam mata pelajaran tertentu disesuaikan dengan karakteristik materi dan mata pelajarannya.

Sebelum menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) para guru terlebih dahulu menyamakan persepsi tentang RPP yang memuat SSK melalui sosialisasi dan *workshop* serta mencontoh dari RPP yang sudah ada dari sekolah yang telah lebih dahulu menerapkan SSK untuk diadopsi dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Sementara itu dalam penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS) juga disesuaikan dengan mata pelajaran tertentu. Sosialisasi atau *workshop* hanya diikuti oleh kepala sekolah dan perwakilan guru termasuk pengurus Sekolah Siaga Kependudukan untuk kemudian diteruskan kepada guru untuk menyesuaikan perangkat pembelajarannya termasuk RPP.

Sekolah Siaga Kependudukan bukan merupakan mata pelajaran baru, melainkan program tersebut diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada sebelumnya. SMA Negeri 1 Pemalang telah mengintegrasikan materi-materi kependudukan ke dalam beberapa mata pelajaran seperti geografi, sosiologi, biologi, dan pendidikan agama dan budi pekerti. Penyampaian materi dan pelaksanaan pembelajaran harus dapat terinternalisasi dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan RPP dan LKPD yang telah disusun sebelumnya.

Pembelajaran di kelas materi siaga kependudukan sudah bisa diterapkan dengan baik sesuai dengan RPP yang telah disusun. Peserta didik dilatih untuk berdiskusi dalam pembelajaran aktif. Peserta didik membentuk kelompok-kelompok yang mendiskusikan tentang materi yang dipelajari pada hari itu. Satu kelompok bertugas sebagai penyaji dan kelompok yang lain bertugas untuk mengajukan beberapa pertanyaan sebagai bahan diskusi kelas. Di akhir sesi guru sebagai yang mendampingi diskusi memberikan klarifikasi tentang apa saja yang telah didiskusikan serta melakukan refleksi tentang materi pembelajaran tersebut bersama peserta didik.

Selain dalam pembelajaran dalam kelas. Sekolah Siaga Kependudukan di SMA Negeri 1 Pemalang diintegrasikan dalam berbagai ekstrakurikuler seperti PIK-R dan PMR. Adanya ekstrakurikuler yang berkaitan dengan kehidupan remaja seperti Palang Merah Remaja (PMR) dan PIK-R sebagai wujud kegiatan program generasi berencana (GenRe) yang bertujuan untuk sarana edukasi peserta didik tentang berbagai hal yang berkaitan dengan remaja dan menjadi sarana para guru untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi peserta didiknya yang mungkin merasa sungkan jika diungkapkan langsung kepada guru dan orang tuanya. Melalui ekstrakurikuler PIK-R peserta didik dapat saling berdiskusi dan berkonsultasi dengan teman sebayanya terkait permasalahan-permasalahan remaja yang dihapinya.

Selain itu terdapat juga beberapa kegiatan sekolah lain seperti sosialisasi dari instansi atau organisasi yang berkompeten serta lomba-lomba seperti lomba Sekolah Siaga Kependudukan dan kontes duta GenRe. Sasaran dari kegiatan penyuluhan atau sosialisasi tersebut adalah semua peserta didik di SMA Kabupaten Pemalang yang menjalankan program Sekolah Siaga Kependudukan. Diharapkan dengan adanya penyuluhan ini dapat lebih mengenalkan peserta didik tentang generasi berencana, menjaga kesehatan reproduksi, dan menghindarkan peserta didik dari hal-hal negatif yang dapat merusak masa depannya. Selain kegiatan penyuluhan, sekolah juga secara berkala mendatangkan dokter atau perawat dari puskesmas yang menjalin kerjasama dengan UKS sehingga peserta didik dapat langsung berkonsultasi secara langsung terkait kesehatan mereka. Adanya kerjasama yang terjalin antara pihak sekolah dan instansi terkait kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan dapat berjalan secara optimal.

Tujuan dari diselenggarakannya Sekolah Siaga Kependudukan adalah menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab para peserta didik terhadap kondisi kependudukan di daerahnya masing-masing; serta mengembangkan sikap dan perilaku yang tepat para peserta didik untuk mengambil keputusan dalam mengatasi masalah-masalah kependudukan. Di era digital seperti sekarang ini peserta didik dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi di internet termasuk berbagai hal yang berkaitan dengan kependudukan. Melalui program Sekolah Siaga Kependudukan dapat meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan yang diharapkan dapat terinternalisasi dalam diri peserta didik dan mempengaruhi sikap, perilaku, serta pilihan-pilihan dalam merencanakan masa depannya. Guru-guru harus menjelaskan dengan baik kepada peserta didik tentang kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan agar peserta didik terhindar dari pergaulan bebas yang menyebabkan tingginya angka nikah usia dini.

Pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan di SMA Negeri 1 Pemalang bukan tanpa kendala. Salah satu faktor penghambat pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan yaitu ketersediaan dana yang minim bahkan tidak ada sama sekali. surat keputusan penunjukkan sekolah SMA Negeri 1 Pemalang menjadi Sekolah Siaga Kependudukan terdapat klausul yang menyatakan bahwa segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini akan dibebankan pada anggaran sekolah. Minimnya dana yang tersedia dan hanya mengandalkan dari anggaran kegiatan lain mengakibatkan pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan tidak bisa berjalan dengan lebih maksimal. Selain itu karena minimnya dana, penyediaan fasilitas pendukung Sekolah Siaga Kependudukan juga menjadi terkendala.

Kendala lainnya berdasarkan penggalan dokumentasi adalah mengenai Sekolah Siaga Kependudukan yang belum diintegrasikan dalam kurikulum sekolah serta tidak adanya pedoman atau modul khusus pelaksanaan sekolah siaga sehingga Sekolah Siaga Kependudukan belum terorganisir dengan baik padahal sekolah sendiri telah berkomitmen dalam mendukung program tersebut dengan membentuk tim pengembangan Sekolah Siaga Kependudukan. Guru hanya diarahkan untuk mengintegrasikan siaga kependudukannya dalam RPP mata pelajaran tertentu.

Kendala selanjutnya adalah tidak adanya penilaian yang secara khusus untuk menilai sejauh mana pemahaman peserta didik tentang kependudukan dan kesehatan reproduksi. Penilaian peserta didik tentunya menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh program tersebut berhasil terinternalisasi pada peserta didik dan seberapa jauh pemahaman peserta didik yang berkaitan dengan siaga kependudukan. Namun sekolah masih belum memiliki format untuk melakukan penilaian tersebut, penilaian peserta didik hanya dilakukan dalam mata pelajaran tertentu yang memiliki kaitan langsung dengan siaga kependudukan seperti mata pelajaran geografi dan biologi.

Sekolah Siaga Kependudukan di SMA Negeri 3 Pematang

Latar belakang dilaksanakan program Sekolah Siaga Kependudukan di SMA Negeri 3 Pematang didasarkan pada adanya penunjukkan dari dinas sosial dan pengendalian penduduk kabupaten Pematang. Selain itu sekolah juga menyadari pentingnya pendidikan kependudukan untuk diajarkan kepada peserta didiknya. Lokasi sekolah yang berada di tengah kota yang padat penduduk yang memiliki permasalahan kependudukan. Selain itu program Sekolah Siaga Kependudukan juga sejalan dengan visi dan misi yang dimiliki sekolah.

Visi misi sekolah merupakan cerminan komitmen dari sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan di SMA Negeri 3 Pematang telah sejalan dengan visi misi yang dimiliki oleh sekolah. SMA Negeri 3 Pematang memiliki visi "Terbentuknya Sumber daya manusia beriman, berbudi pekerti luhur, berprestasi, mengembangkan iptek, peduli lingkungan dan kependudukan serta berwawasan kebangsaan dan global". Untuk mencapai visi tersebut SMA Negeri 3 Pematang juga memiliki misi sebagai berikut: 1) Menumbuhkan suasana sekolah yang religius sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dalam bersikap dan bertingkah laku; 2) Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang berkualitas, menanamkan kepedulian terhadap masalah lingkungan dan kependudukan, menyenangkan, didukung dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memadai serta lingkungan sekolah yang bersih, aman, inklusif, indah, dan nyaman; 3) Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan bakat dan minat peserta didik secara optimal untuk meraih prestasi; 4) Mengutamakan keteladanan seluruh warga sekolah untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap Pancasila dan UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SMA Negeri 3 Pematang telah melaksanakan program Sekolah Siaga Kependudukan sejak akhir tahun 2019. Berdasarkan analisis dokumen peneliti menemukan adanya nota dinas yang ditujukan untuk SMA Negeri 3 Pematang tentang peluncuran program Sekolah

Siaga Kependudukan yang bertanggal 19 Desember 2019. Kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan yang menunjuk SMA Negeri 3 Pemalang bersama dengan SMA Negeri 1 Pemalang sebagai sekolah yang menjalankan program Sekolah Siaga Kependudukan.

Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan seharusnya memiliki sarana dan prasarana yang baik untuk mendukung terlaksananya program pendidikan. Sarana dan prasarana sekolah menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang proses kegiatan pembelajaran. Termasuk dalam menunjang pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan tidak bisa berjalan tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai. SMA Negeri 3 Pemalang terletak di pusat kota Pemalang berdiri di atas lahan seluas 4.111 m². Bangunan SMA Negeri 3 Pemalang merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang ada di Kabupaten Pemalang. Meskipun memiliki luas lahan yang relatif kecil dan berada di pusat kota. SMA Negeri 3 Pemalang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, memadai serta dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif. Sekolah memiliki berbagai fasilitas seperti ruang kelas yang representatif yang dilengkapi LCD proyektor dan perpustakaan mini di setiap kelasnya.

Sekolah telah berusaha menyediakan sarana dan prasarana yang baik untuk mendukung terlaksananya program SSK. Sekolah menyediakan pojok kependudukan sebagai pusat kegiatan peserta didik yang berkaitan dengan kependudukan dan merupakan salah satu identitas dari sekolah yang telah menjalankan SSK. Selain itu sekolah memiliki pendopo atau aula serbaguna yang cukup luas. Sebagai salah satu sarana penting dalam Sekolah Siaga Kependudukan, pojok kependudukan juga dilengkapi berbagai fasilitas untuk peserta didiknya seperti disediakan berbagai literatur dan mading tempat meletakkan berbagai karya peserta didik. Namun disayangkan ruangan yang dijadikan pojok kependudukan kurang ditata dengan baik, banyak barang-barang yang ditumpuk begitu saja.

Sekolah Siaga Kependudukan tidak bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan dari sumber daya manusia yang mumpuni. SMA Negeri 3 Pemalang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat (humas), wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, serta staff dan koordinator masing-masing bidang. SMA Negeri 3 Pemalang memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional. Sebagai bentuk komitmen sekolah dalam pendidikan kependudukan, Sekolah Siaga Kependudukan mendapat dukungan penuh dari segenap warga sekolah.

Suatu program tidak mungkin dapat berjalan jika tanpa dukungan dari semua pihak. Begitu pula Sekolah Siaga Kependudukan sebagai salah satu program pendidikan kependudukan yang diyakini oleh sekolah sebagai suatu program yang baik sehingga perlu dukungan dari semua pihak dari mulai komite, kepala sekolah, guru serta seluruh peserta didik. Karena sekolah memandang bahwa isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan dan kependudukan sangat penting untuk diajarkan kepada peserta didik.

Sekolah Siaga Kependudukan merupakan upaya untuk mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran dan atau muatan lokal khusus kependudukan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Sekolah Siaga Kependudukan belum diatur dalam kurikulum sekolah. SMA Negeri 3 Pemalang telah melaksanakan program Sekolah Siaga Kependudukan yang

diintegrasikan dalam beberapa mata pelajaran yang sudah ada dan ke dalam beberapa kegiatan yang dijalankan oleh sekolah.

SMA Negeri 3 Pemalang saat ditunjuk menjadi Sekolah Siaga Kependudukan, sekolah hanya mengintegrasikan ke dalam beberapa mata pelajaran tertentu melalui RPP yang telah disusun oleh guru karena tidak semua mata pelajaran dapat disisipkan materi kependudukan. Mata pelajaran yang telah dapat diintegrasikan dengan Sekolah Siaga Kependudukan antara lain geografi, biologi, dan sosiologi. RPP yang disusun merupakan tanggung jawab oleh masing-masing guru namun dalam penyusunannya disesuaikan dengan arahan dari kepala sekolah untuk menyisipkan materi kependudukan. Di dalam RPP tersebut harus menuliskan atau mengarah kepada SSK baik dalam kompetensi dasar maupun dalam materi yang diajarkan.

Guru dalam menyusun RPP berpedoman pada silabus sebagai rambu-rambunya. Sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap isu-isu kependudukan, sekolah terus berupaya memberikan sosialisasi kepada guru untuk senantiasa mengintegrasikan Sekolah Siaga Kependudukan dalam pembelajarannya. Berdasarkan hasil dokumentasi peneliti juga menemukan dokumen RPP yang telah mengintegrasikan materi kependudukan di dalamnya. Mata pelajaran yang telah terintegrasi antarlain geografi, sosiologi, dan biologi.

Materi siaga kependudukan sudah bisa diterapkan dengan baik sesuai dengan RPP yang telah disusun. Peserta didik dilatih untuk berdiskusi dalam pembelajaran aktif. Peserta didik membentuk kelompok-kelompok yang mendiskusikan tentang materi yang dipelajari. Peserta didik juga terlihat antusias mendengarkan penjelasan dari guru tentang materi yang diajarkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip sekolah siaga kependudukan yang dikemukakan oleh BKKBN (2017: 9) bahwa sekolah siaga kependudukan merupakan program yang mengutamakan peran aktif peserta didik dalam mengamati, mengumpulkan, menganalisis, dan mengomunikasikan informasi atau pengetahuan yang berkaitan dengan dinamika demografi yang terdapat di wilayahnya.

Selain dalam kegiatan pembelajaran, Sekolah Siaga Kependudukan juga dapat diintegrasikan dengan kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan sekolah lainnya. Untuk menunjang pelaksanaan SMA Negeri 3 Pemalang mengintegrasikan program tersebut ke dalam beberapa kegiatan sekolah diantaranya kegiatan jumat pagi untuk membersihkan lingkungan. Sekolah dengan menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kependudukan agar peserta didik dapat belajar dengan gembira. Terdapat aktivitas atau kegiatan lain yang mengarah pada Sekolah Siaga Kependudukan. Seperti adanya lomba Sekolah Siaga Kependudukan yang diikuti oleh sekolah maupun kontes pemilihan duta genre yang diikuti oleh peserta didik itu sendiri. Selain itu untuk lebih mengenalkan peserta didik tentang kependudukan, kesehatan reproduksi dan generasi berencana SMA Negeri 3 Pemalang juga sering mengadakan sosialisasi atau seminar yang berkaitan dengan hal tersebut dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten.

Sekolah Siaga Kependudukan yang bertujuan untuk membekali peserta didik dengan wawasan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan terkait Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Sebagai hasil dari pelaksanaan program tersebut peserta didik telah memiliki pemahaman, sikap, dan keterampilan yang baik tentang

pendidikan kependudukan dan kesehatan reproduksi. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil angket peserta didik yang menunjukkan tentang pemahaman peserta didik tentang kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia pernikahan serta sikap dan perilaku serta pilihan-pilihan dalam merencanakan masa depannya berada diangka lebih dari 90% dan pengetahuan peserta didik mengenai isu kependudukan dalam kehidupan sehari-harinya lebih dari 89%.

Program Sekolah Siaga Kependudukan yang dilaksanakan di SMA Negeri 3 Pemalang berjalan bukan tanpa kendala. Berdasarkan pengamatan di lapangan ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh SMA Negeri 3 Pemalang. Gedung sekolah yang berada di tengah bangunan-bangunan lain sehingga sangat sulit untuk leluasa mengembangkan ruang untuk peserta didik. Selain itu beberapa bagian bangunan SMA Negeri 3 Pemalang merupakan cagar budaya daerah menambah kesulitan sekolah dalam mengembangkan bangunan, termasuk dalam hal penyediaan ruang untuk Sekolah Siaga Kependudukan. Pojok kependudukan yang dimiliki sekolah berukuran cukup kecil dan bertempat dibawah tangga sehingga ruangan sangat terbatas. Untuk mensiasati hal tersebut sekolah menyediakan pendopo sederhana yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan termasuk yang berkaitan dengan kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan seperti seminar ataupun sosialisasi.

Kendala lain yang dihadapi oleh SMA Negeri 3 Pemalang yaitu tidak adanya dana atau anggaran khusus dalam menjalankan program Sekolah Siaga Kependudukan. Di dalam Surat Keputusan penunjukkan Sekolah Siaga Kependudukan oleh dinas sosial, terdapat klausul yang tertulis bahwa setiap biaya yang timbul dari kegiatan program Sekolah Siaga Kependudukan dibebankan pada sekolah. Tidak adanya dana atau anggaran yang dapat digunakan untuk pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan tentu menjadi hambatan tersendiri. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk Sekolah Siaga Kependudukan menjadi sangat terbatas dan hanya dapat disisipkan dalam kegiaiatan sekolah saja. Begitu juga dalam hal melengkapi fasilitas-fasilitas penunjang Sekolah Siaga Kependudukan menjadi terbatas. Sementara solusi yang dimiliki sekolah yaitu dengan mengikutsertakan Sekolah Siaga Kependudukan dalam kegiatan lain seperti MPLS dan pembelakan pendidikan karakter.

Kendala yang terakhir yaitu tidak adanya penilaian yang dapat menjadi tolak ukur efektivitas pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan di SMA Negeri 3 Pemalang dan tolak ukur kemampuan peserta didik setelah mengikuti program tersebut. Penilaian tersebut hanya ada pada mata pelajaran tertentu dan materi tertentu saja. Penilaian peserta didik tentunya menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh program tersebut berhasil terinternalisasi pada peserta didik dan seberapa jauh pemahaman peserta didik yang berkaitan dengan siaga kependudukan.

Simpulan dan Saran

SMA Negeri 1 Pemalang telah melaksanakan sekolah siaga kependudukan sejak tahun 2021 yang dilatar belakangi oleh adanya penunjukkan dari dinas sosial dan pengendalian penduduk di kabupaten Pemalang. SMA Negeri 1 Pemalang dianggap sebagai salah satu sekolah yang representatif untuk melaksanakan program tersebut dan sesuai dengan visi sekolah yaitu membentuk wawasan lingkungan dan global. Sebagai bentuk komitmen sekolah telah menyediakan fasilitas guna mendukung pelaksanaan program tersebut, salah satunya adalah pojok kependudukan sebagai salah satu identitas sekolah siaga kependudukan. Selain

itu sebagai bentuk dukungan sekolah telah membentuk tim pengembangan sekolah siaga kependudukan yang melibatkan seluruh guru dan warga sekolah.

SMA Negeri 1 Pemalang telah mengintegrasikan sekolah siaga kependudukan dalam pembelajaran dikelas melalui RPP yang disusun oleh guru. Contoh mata pelajaran yang telah diintegrasikan antarlain geografi, biologi, sejarah, dan pendidikan agama dan budi pekerti. Selain dalam pembelajaran sekolah siaga kependudukan juga diintegrasikan dalam ekstrakurikuler dan kegiatan sekolah lain seperti PIK-R dan seminar dan sosialisasi. Kendala yang dihadapi SMA Negeri 1 Pemalang dalam pelaksanaan sekolah siaga kependudukan yang harus menindaklanjuti antarlain: konsistensi guru dalam melaksanakan program, ketersediaan dana yang sangat terbatas, dan belum adanya pedoman serta penilaian sebagai tolak ukur pengetahuan peserta didik dan epektifitas program yang dijalankan.

SMA Negeri 3 Pemalang telah melaksanakan sekolah siaga kependudukan sejak tahun 2019 yang melatarbelakanginya yaitu adanya penunjukkan dari dinas terkait. Selain itu adanya kesadaran dari sekolah untuk membekali peserta didiknya tentang kependudukan karena sekolah berada di tengah padatnya penduduk. Sekolah siaga kependudukan juga sejalan dengan visi yang dimiliki sekolah yaitu terbentuknya sumber daya manusia beriman, berbudi pekerti luhur, berprestasi, mengembangkan iptek, peduli lingkungan dan kependudukan serta berwawasan kebangsaan dan global. Sebagai bentuk komitmen sekolah telah menyediakan sarana prasarana yang baik berupa pojok kependudukan yang menjadi identitas dan pusat kegaitan siaga kependudukan di sekolah. Sekolah siaga kependudukan diintegrasikan dalam beberapa mata pelajaran yang sudah ada seperti geografi, sosiologi, dan biologi melalui RPP yang telah disusun oleh guru. Selain itu sekolah siaga kependudukan juga diintegrasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain seperti seminar dan sosialisasi. Kendala yang dihadapi SMA Negeri 3 Pemalang dalam melaksanakan sekolah siaga kependudukan yaitu gedung sekolah yang berada di tengah bangunan-bangunan lain sehingga sangat sulit untuk leluasa mengembangkan ruang untuk peserta didik, tidak adanya dana atau anggaran khusus dalam menjalankan program sekolah siaga kependudukan, serta belum adanya pedoman dan penilaian untuk mengukur pengetahuan peserta didik dan mengukur epektifitas program.

Referensi

- Abdiyah, A; Hartanti, F., I. & Sulistyorini, Y. (2019). Implementation analysis of sekolah siaga kependudukan (SSK) in East Java 2019. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, 9(2): 137–145. DOI: 10.20473/jbk.v9i2.2020.137–145.
- Alvianita, E. (2018). Mewujudkan masyarakat berawawasan kependudukan. Diakses 10/03/2022 Pukul 09.56 <https://jabar.bkkbn.go.id/?p=1317>
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2017). *Pedoman pengelolaan pendidikan kependudukan melalui sekolah siaga kependudukan (SSK) di SMP, SMA dan sederajat*. Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2019). *Petunjuk pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal, non formal, dan informal*. Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2020). *Rencana strategis BKKBN*. Jakarta: BKKBN.

- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik pendidikan. Jakarta. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- Catursaptani, R. & Raharja, M. B. (2019). *Dampak Sekolah Siaga Kependudukan terhadap wawasan kependuduk siswa SMA di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur*. Jakarta: Puslitbang Kependudukan BKKBN
- Chau, K., Traoré Seck, A., Chandra-Mouli, V., & Svanemyr, J. (2016). Scaling up sexuality education in Senegal: integrating family life education into the national curriculum, *Sex Education*, 16(5), 503-519. DOI: <https://doi.org/10.1080/14681811.2015.1123148>
DOI: <https://doi.org/10.15294/jess.v11i2.59983>
- Faqiha, N. Z. (2018). Mewujudkan masyarakat berwawasan kependudukan melalui pendidikan kependudukan. Diakses 10/03/2022 pukul 13.00 <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/4935/mewujudkan-masyarakat-berwawasan-kependudukan-melalui-pendidikan-kependudukan>
- Hasil sensus penduduk (2020). Berita resmi statistik No. 7/01/Th. XXIV, 21 Januari 2021 <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- Hidayat, R. (2016). Pedang bermata dua bernama bonus demografi <https://tirto.id/pedang-bermata-dua-bernama-bonus-demografi-btVG> diakses Pukul 11.00 29/04/2023 <http://dp3ap2.jogjaprovo.go.id/berita/detail/559-perilaku-seks-pranikah-remaja>.
- Husin, A. (2017). Peranan pendidikan kependudukan terhadap pelestarian lingkungan hidup. *Demography Journal Of Sriwijaya (DeJoS)*, 1(1), 14-19. Retrieved from <http://ejournal-pps.unsri.ac.id/index.php/dejos/article/view/2>
- Jayadevi, P. (2020). Cognitive and emotive aspects of learning population education among students in Chennai. *International Journal of Research - Granthaalayah*, 8 (2), 168-175.
- Jayasuriya, J. E. (1974). *Population education: Its goals, related guidelines, and considerations for curriculum*.
- Kartika, Y., & Hidayah, N. (2021). Implementasi program siaga kependudukan pada SMAN 1 Ngaglik Sleman. *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 10 (2), 174-190. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v10i2.47322>.
- Mu'awwanah, U., & Ridho Illah, G. R. (2022). Problematika Kependudukan Indonesia. *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 63-78. Retrieved from <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/877>
- Vintaria, V., Handini, M. C. ., Siregar, L. M. ., Manurung, K. ., & Sitorus, M. E. J. . (2023). Perilaku seks bebas pada remaja. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(2), 1409–1420. <https://doi.org/10.31004/jkt.v4i2.15740>
- Nida, N. H. (2020). Perilaku seks pranikah remaja. tersedia pada laman: https://dp3ap2.jogjaprovo.go.id/berita/detail?judul_seo=559-perilaku-seks-pranikah-remaja
- Prasetyo, Y. (2014). Pengetahuan remaja tentang pendidikan kependudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (*Doctoral dissertation*, Universitas Gadjah Mada).
- Septiani, E., Setyowati, D., & Atmaja, H. (2022). Integrating Population Education in Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) in Building a Planned Generation. *JESS (Journal of Educational Social Studies)*, 11(2), 113-121.
- Sitorus, M. A. (2017). Integrasi pendidikan kependudukan ke dalam kurikulum dalam rangka pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017 Vol. 1 No. 1 2017, Hal. 83-87*.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.

Ulfah, R. (2021). Implementasi sekolah siaga kependudukan melalui pembelajaran geografi di MAN Insan Cendekia Tanah Laut, *Jurnal Geografika: Geografi Lingkungan Lahan Basah*, 2(2), 91-100. DOI: <https://doi.org/10.20527/jgp.v2i2.5013>

United Nation Population Fund (UNFPA). 2023. *World population dashboard*. <https://unfpa.org/data/world-population-dashboard> diakses pukul 11.00 29/04/2023.